

Ditanggung Kemenhub Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

SEDARI awal mulai masa uji coba pada Juli 2024, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru menyediakan tiga koridor untuk layanan Balikpapan *City Trans* (BCT). Itu pada jalan protokol di Kota Minyak yang dianggap padat.

Setelah kurang lebih beroperasi tujuh bulan, Pemkot Balikpapan hingga kini belum mengusulkan penambahan koridor baru untuk angkutan umum dengan skema *buy the service* (BTS) tersebut.

Alasannya perlu melihat kondisi *load factor* atau faktor muat yang ada. Apalagi setelah nanti berlaku tarif BCT secara resmi, pihaknya perlu melihat bagaimana dari sisi tingkat keterisian angkutan.

“Kami harus menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah juga untuk mengusulkan koridor baru,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan Zulkifli kepada Kaltim Post, Rabu (5/3).

Dia menjelaskan, terlebih sekarang pemerintah pusat fokus kepada program makan bergizi gratis (MBG). Seluruh lembaga, kementerian, hingga pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi anggaran.

“Apabila memang kondisi nanti sudah stabil lagi dan jika memungkinkan kami untuk mengusulkan koridor baru,” sebutnya. Sebelumnya beredar kabar mulai 1 Februari 2025, subsidi angkutan umum termasuk angkutan perintis ditiadakan.

Imbas efisiensi anggaran, semua angkutan umum yang mendapat subsidi dari APBN tidak lagi beroperasi. Sementara BCT termasuk salah satu angkutan yang dana operasionalnya berasal dari APBN.

Zul memastikan terbukti saat ini, layanan BCT tidak terdampak efisiensi anggaran. “Sekarang operasional BCT kan masih berjalan normal. Pembiayaan masih dari Kemenhub juga,” ungkapnya.

Dia berharap, BCT yang masuk pelayanan masyarakat tidak terdampak efisiensi anggaran di pemerintah pusat. Layanan BCT diselenggarakan oleh Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bekerja sama dengan Dishub Balikpapan.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPTD Kelas II Kaltim menunjukkan *load factor* Balikpapan *City Trans* (BCT) sudah hampir mencapai 100 persen. Terutama untuk Koridor A Pelabuhan Semayang - Bandara Sepinggang menjadi koridor terpadat.

Koridor A memiliki tingkat *load factor* lebih dari 100 persen. Sedangkan *load factor* pada Koridor B Terminal Batu Ampar via Jalan Ahmad Yani dan Koridor C Terminal Batu Ampar via Jalan MT Haryono masih di bawah 100 persen.

Jika dihitung ketiga koridor, rata-rata *load factor* BCT masih dibawah 100 persen. Namun untuk penambahan armada perlu evaluasi. Salah satu indikator melihat dari tingkat *load factor* yang lebih dari 100 persen. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Ditanggung Kemenhub Tak Terdampak Efisiensi Anggaran, 06/03/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Operasional Balikpapan City Trans Masih Ditanggung Kemenhub, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran Pusat, 05/03/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota, antarprovinsi, serta lintas batas negara.
 - (2) Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
 - (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
 - (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
 - (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.